

## KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

Yuni Sudarwati

19

### Abstrak

*Pemerintah akan memberikan insentif melalui pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan diambil karena pandemi Covid-19, industri otomotif mengalami penurunan sangat parah dan memiliki multiplier effect yang besar. Namun kebijakan ini juga ditengarai tidak akan memberikan efek sesuai yang diharapkan akibat persepsi masyarakat akan penanganan pandemi yang memengaruhi daya beli. Tulisan ini mengkaji kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor dan hal apa saja yang dapat menimbulkan kontraproduktif akibat kondisi tingkat konsumsi masyarakat yang belum mendukung. DPR RI terutama Komisi XI dan komisi VI harus dapat memastikan dan mengawasi kebijakan tersebut di lapangan agar industri otomotif dapat bertahan di tengah pandemi. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga harus mengawasi upaya penanganan pandemi oleh pemerintah. Hal ini demi peningkatan rasa aman yang akan mendorong masyarakat untuk berbelanja dan kembali memiliki daya beli yang saat ini tertahan sebagai salah satu daya ungkit bagi perekonomian Indonesia.*

### Pendahuluan

Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mendorong industri otomotif menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas untuk kembali berbelanja. Pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk otomotif di segmen kendaraan dengan kapasitas silinder <1.500 cc pada kategori sedan dan kendaraan dengan sistem penggerak 4x2. Kebijakan bertujuan meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan Tingkat Kandungan Dalam

Negeri (TKDN) di atas 70%. Insentif rencananya akan diberlakukan mulai 1 Maret 2021. Insentif akan diberikan bertahap setiap 3 bulan selama 9 bulan. Pada tahap pertama diberikan insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif. Pada tahap kedua diberikan insentif PPnBM 50% dari tarif dan 25% dari tarif untuk tahap ketiga (Media Indonesia, 13 Februari 2021).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan industri otomotif perlu diperkuat karena selama pandemi sektor ini mengalami dampak yang parah. Sementara kontribusi otomotif dan industri



pendukungnya terhadap PDB manufaktur sangat signifikan, berkisar Rp700-800 triliun. Sekitar 91,6% konsumsi mobil adalah produksi Indonesia yang kandungan lokalnya rerata 70%. Sehingga diharapkan jika otomotif kembali bergerak maka kontribusi ke PDB manufaktur juga akan meningkat (Bisnis Indonesia, 15 Februari 2021). Namun di sisi lain, kondisi masyarakat belum sepenuhnya normal. Daya beli masyarakat masih sangat rendah, bahkan tidak lagi punya daya beli, karena masyarakat kelas menengah ke bawah banyak yang kehilangan pekerjaan. Sementara kelompok masyarakat menengah ke atas yang menjadi target dari kebijakan ini masih memilih untuk menabung daripada berbelanja. Tulisan ini mengkaji kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan per 1 Maret 2021 dan hal-hal yang dapat menimbulkan kontraproduktif akibat kondisi masyarakat yang belum mendukung.

### Alasan Lahirnya Kebijakan Insentif Pajak

Penjualan mobil merosot tajam sejak pandemi melanda. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Jodjana Jody, pengamat otomotif dan industri pembiayaan menilai langkah relaksasi PPnBM dinilai tepat karena melihat pengalaman beberapa negara yang sukses dengan kebijakan yang hampir serupa. Ini tepat untuk mendorong konsumsi kelas menengah atas dan juga sektor otomotif Indonesia yang tahun lalu turun drastis dibanding negara tetangga yang

sukses memberikan insentif. (Bisnis Indonesia, 15 Februari 2021).

Beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara yang sudah melaksanakan kebijakan untuk merangsang masyarakat membeli mobil adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand (kumparan.com, 2020). **Pertama**, Malaysia yang mulai mengalami penurunan penjualan mobil sejak akhir Maret. Malaysia memberikan pembebasan pajak penjualan mobil baru sampai 100%, untuk mendorong industri otomotif. Ketentuannya sederhana, untuk mobil rakitan lokal (CKD), pembebasannya mencapai 100%. Sementara yang diimpor (CBU), hanya 50%. Setiap mobil yang akan dijual di Malaysia dikenakan sales tax sebesar 10%, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (DP PKB) yang disetujui pemerintah.

**Kedua**, Vietnam yang turut berupaya menyelamatkan industri otomotif, dengan merangsang permintaan pasar. Per 28 Juni 2020, pemerintah memberikan insentif pemangkasan pajak pendaftaran mobil baru sampai 50%, untuk produk yang diproduksi lokal. **Ketiga**, Thailand yang mendorong penjualan dengan memberikan insentif pajak, bagi masyarakat atau perusahaan yang mau mengganti mobil lamanya (15 tahun), ke mobil baru atau mobil listrik. Tak tanggung-tanggung, insentif ini akan berlaku sampai 5 tahun ke depan.

Berkaca dari praktek beberapa negara tetangga tersebut, Indonesia berusaha untuk menjalankan kebijakan serupa. Hal ini mengingat bahwa kondisi yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Sepanjang 2020, realisasi

penjualan mobil dari pabrikan ke dealer (*wholesales*) secara total turun 48,35% (*year-on-year*) dari 1.030.126 unit menjadi 532.027 unit. Adapun, penjualan mobil dari dealer ke konsumen (*ritel*) turun 44,45% dari 1.043.017 unit ke posisi 578.327 unit (Bisnis Indonesia, 15 Februari 2021).

Pemerintah berharap bahwa relaksasi akan memberikan dampak positif berantai ke sektor-sektor manufaktur pendukung otomotif dan industri pembiayaan. Harapannya, dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Dengan adanya momentum lebaran juga diharapkan mendorong masyarakat untuk membeli mobil dengan 0% PPnBM selama tiga bulan pertama.

Selain itu, dengan relaksasi harga mobil baru akan lebih murah dan mendekati daya beli konsumen sehingga diharapkan akan merangsang pemulihan produksi dan penjualan. Jika terjadi pemulihan produksi dan penjualan hal itu akan berdampak luas bagi sektor industri lain yang berhubungan dengan industri otomotif seperti komponen dan juga industri yang terkait rantai distribusi seperti dealer, pembiayaan, hingga layanan purna jual.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) industri otomotif melibatkan sekitar 1,5 juta orang pekerja yang terdiri atas pelaku industri *tier II* (komponen

pelengkap) dan *tier III* (komponen tambahan) dengan jumlah mencapai sekitar 1.000 perusahaan dan 210.000 pekerja. Adapun untuk industri *tier I* (komponen inti otomotif), memiliki sekitar 550 perusahaan dengan 220.000 pekerja. Di sektor perakitan terdapat sekitar 22 perusahaan dan 75.000 pekerja. Adapun jumlah dealer serta bengkel resmi tercatat mencapai 14.000 perusahaan dengan 400.000 pekerja, serta dealer dan bengkel tidak resmi 42.000 perusahaan dengan 595.000 pekerja (Bisnis Indonesia, 15 Februari 2021).

Pemerintah juga memperkirakan bahwa dengan adanya pembebasan PPnBM bagi mobil penumpang berpenggerak 4x2 dan berkubikasi mesin kurang dari 1.500cc termasuk sedan, serta model yang memiliki kandungan lokal 70% akan meningkatkan produksi kendaraan bermotor 81.752 unit dan menyumbang pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun (Bisnis Indonesia 15 Februari 2021). Pernyataan senada diberikan juga oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, yang menyatakan bahwa relaksasi kendaraan PPnBM untuk kendaraan bermotor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya industri otomotif yang terdampak akibat pandemi. Relaksasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan membeli dari masyarakat dan memberikan lompatan pada perekonomian (Republika, 13 Februari 2021).

### **Catatan Pelaksanaan Kebijakan**

Kebijakan relaksasi ini ditujukan terutama untuk merangsang daya beli masyarakat

untuk membeli mobil. Sehingga harapannya adalah industri otomotif akan bangkit dan tentu saja akan menarik industri pendukung serta industri yang ada dalam rantai distribusi untuk ikut bangkit kembali. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan nantinya. **Pertama** terkait persepsi masyarakat akan penanganan pandemi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Saat ini meski sudah terjadi peningkatan belanja masyarakat namun dampaknya belum terasa. Hal ini karena pola konsumsi masyarakat saat pandemi mengalami perubahan akibat penurunan ekonomi yang terjadi. Masyarakat yang mulai kembali berbelanja adalah masyarakat menengah bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Sementara belanja kelompok menengah atas masih di bawah kondisi sebelum terjadinya Covid-19. Padahal porsi konsumsi terbesar itu ada di kelas menengah atas (liputan6.com, 30 Januari 2021).

Ekonom *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan mengemukakan, saat ini dari sisi daya beli, hampir semua lapisan masyarakat cenderung menunda konsumsi barang yang bukan prioritas di mana salah satunya adalah kendaraan bermotor. Jadi relaksasi PPnBM ini memang cukup menjanjikan bagi industri otomotif untuk kembali bangun dari kontraksi, tetapi di sisi lain pemerintah juga perlu memberikan kepastian kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat (Bisnis Indonesia, 15 Februari 2021).

Permasalahan utama

dari menurunnya penjualan kendaraan bermotor adalah Covid-19. Masyarakat masih banyak yang merasa khawatir, sehingga memutuskan untuk menyimpan uangnya untuk berjaga-jaga jika kondisi tidak juga membaik. Peneliti *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa masyarakat kelas menengah atas masih cenderung menabung ketimbang berbelanja pada Semester I Tahun 2021. Hal ini berdasarkan data LPS per Desember 2020, simpanan senilai Rp100-200 juta masih tumbuh. Dengan kondisi pemulihan ekonomi yang belum stabil, masyarakat tentu akan meningkatkan jumlah tabungan (Kompas, 16 Februari 2021). Jika Covid-19 belum terselesaikan, bisa dipastikan insentif pajak ini akan sia-sia. Apalagi jika melihat bahwa kendaraan dengan kriteria yang diberikan pemerintah cenderung menjadi konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas.

Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi saat ini, kelompok masyarakat ini masih belum berani banyak berbelanja dan memilih menunggu penyebaran virus melandai terlebih dahulu untuk melakukan konsumsi. Dengan kata lain kebijakan insentif pajak ini harus didahului kesuksesan pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Setelah itu, masyarakat dapat percaya dan merasa aman untuk kembali melakukan pembelian kendaraan (Republika, 15 Februari 2021).

**Kedua**, dampak PPnBM hanya jangka pendek. Menurut Ekonom *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) Andry Satrio Nugroho, PPnBM hanya akan

memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek. Sebab, relaksasi pajak itu hanya ditujukan untuk beberapa jenis kendaraan. Selain itu, dampak insentif hanya akan terasa pada periode Maret-Mei. Hal ini karena pada tahap inilah insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan. Sehingga dampak insentif terhadap konsumsi rumah tangga akan dirasakan paling signifikan pada periode ini (Republika, 13 Februari 2021). Andry menyatakan bahwa kebijakan paling efektif untuk saat ini adalah kembali ke penanganan pandemi. Jika pandemi terkendali, aktivitas industri pun akan meningkat dan pada akhirnya daya beli masyarakat akan meningkat.

Namun jika pemerintah ingin mengejar perbaikan daya beli kelompok masyarakat menengah, yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk mendukung agar kebutuhan sehari-harinya terjaga. Bahkan mungkin insentif untuk mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan.

**Ketiga**, insentif pajak berpotensi menekan pendapatan negara. Ketua dewan pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (Pikko) Wan Fauzi berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada upaya meningkatkan penjualan mobil saja. Hal ini mengingat bahwa kemungkinan penjualan mobil yang akan mendapatkan insentif adalah penjualan mobil yang untuk menghabiskan stok tahun lalu yang saat ini ada di gudang. Kalaupun ada produksi baru lagi, paling setelah Hari Raya Idul Fitri atau 3 bulan lagi. Oleh karena itu kebijakan relaksasi harus diterapkan secara hati-hati. Jangan sampai stimulus hanya akan menekan pendapatan negara dari pajak yang

sebelumnya sudah berkontraksi dalam (Republika, 13 Februari 2021).

### Penutup

Stimulus pajak untuk menyelesaikan permasalahan dalam industri otomotif merupakan hal yang positif, namun juga perlu hati-hati dalam pelaksanaannya. Penurunan tingkat konsumsi kelas menengah atas saat ini bukan karena hilangnya daya beli, melainkan karena menahan sementara konsumsi akibat kekhawatiran akan pandemi yang belum reda di tahun 2021. Untuk mendorong konsumsi, salah satunya upaya ialah menghilangkan kekhawatiran publik dan membangkitkan kembali kepercayaan terhadap penanganan Covid-19. Karena itu, penanganan dengan serius dan penanggulangan pandemi mutlak harus diutamakan.

Jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke atas, maka insentif seperti pengurangan pajak kendaraan bermotor dapat diberikan untuk mendukung industri otomotif dalam negeri agar dapat bertahan. DPR RI terutama Komisi XI dan Komisi VI harus dapat memastikan dan mengawasi kebijakan tersebut di lapangan agar industri otomotif dapat bertahan di tengah pandemi. Pelaksanaan insentif pajak juga harus dipastikan tepat sasaran dan memiliki target waktu selama pandemi agar tidak membebani anggaran negara di tahun 2021. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga harus mengawasi upaya penanganan pandemi. Hal ini penting demi peningkatan rasa aman yang akan mendorong masyarakat untuk berbelanja dan kembali memiliki daya beli yang saat ini tertahan sebagai salah satu daya ungkit bagi perekonomian

Indonesia.

### Referensi

“Industri Penunjang Masih Sangsi”, *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 2021, hal. 4.

“Insentif Jangan Sampai Kontraproduktif”, *Republika*, 13 Februari 2021, hal. 7.

“Konsumsi Belanja Masyarakat Bakal Pulih Mulai 2021”, 30 Januari 2021, <https://www.liputan6.com/saham/read/4470496/konsumsi-belanja-masyarakat-bakal-pulih-mulai-2021>, diakses 16 Februari 2021.

“Konsumsi Masyarakat Bergeming”, *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 2021, hal. 11.

“Malaysia, Thailand, dan Vietnam Beri Keringanan Pajak Mobil Baru, Indonesia?”, 15 Oktober 2020, <https://kumparan.com/kumparano/malaysia-thailand-dan-vietnam->

[beri-keringanan-pajak-mobil-baru-indonesia-1uOavQdf9i2/full](https://www.kumparan.com/kumparano/beri-keringanan-pajak-mobil-baru-indonesia-1uOavQdf9i2/full), diakses 15 Februari 2021.

“Mengukur Daya Tarik PPn BM Mobil Nol Persen”, *Republika*, 15 Februari 2021, hal. 5.

“Multifinance Waspada Over Financing”, *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 2021, hal. 15.

“Pemulihan Tetap Utama”, *Kompas*, 16 Februari 2021, hal. 10.

“Pengurangan Pajak Kendaraan Baru Geliatkan Ekonomi”, *Media Indonesia*, 13 Februari 2021, hal. 2.

“Tenaga Baru Otomotif”, *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 2021, hal. 1.



Yuni Sudrawati  
[yuni.sudarwati@dpr.go.id](mailto:yuni.sudarwati@dpr.go.id)

Yuni Sudrawati, S.IP., M.Si., menyelesaikan pendidikan Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Manajemen di Magister Sains Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan kepakaran Manajemen dan Kebijakan.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.